

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bertitik tolak dari pengalaman krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, sektor pertanian dan pedesaan saat ini memegang peranan penting dan perlu diarahkan untuk menjadi penggerak utama dalam pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan sektor pertanian diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional sekaligus mengatasi masalah pemerataan dan pengentasan kemiskinan. Akan tetapi keberhasilan pengembangan sektor pertanian perlu mendapat dukungan dari pemerintah dengan kebijakan mikro dan makro terutama yang berkaitan dengan permodalan.

Salah satu ciri umum yang melekat dalam masyarakat pedesaan yang sebagian besar petani adalah permodalan yang lemah. Padahal permodalan merupakan unsur yang esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Kurangnya modal membatasi ruang gerak aktivitas usaha petani, yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan. Pemilikan dana yang terbatas, sementara sumber dana dari luar yang bisa membantu mengatasi kekurangan modal tidak mudah diperoleh, membuat semakin sulitnya usaha untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat petani di pedesaan. (Suandi, 1990)

Selama ini, modal merupakan faktor penentu bagi petani dalam menjalankan usahanya belum banyak mendapat perhatian dari pemerintah, padahal untuk memenuhi tuntutan permintaan terhadap hasil-hasil pertanian dengan kualitas dan kuantitas yang semakin tinggi dibutuhkan modal yang cukup besar. Secara keseluruhan dukungan penyediaan modal bagi petani agribisnis (pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan) terutama skala kecil-menengah masih harus diperhatikan lebih baik lagi karena dengan dukungan modal yang lebih baik diharapkan dapat

menghasilkan output yang optimal sehingga pertumbuhan sektor pertanian semakin cepat.

Menurut Napitulu (2003), hasil kerja dari lembaga kredit formal dengan berbagai jenis pinjaman yang ditawarkan, belum mencapai sasaran yang diharapkan. Sistem pendukung permodalan berupa fasilitas kredit yang selama ini diberikan oleh pihak perbankan maupun non-perbankan belum cukup membantu kebutuhan modal petani, karena pada umumnya petani kesulitan dalam mengakses fasilitas kredit tersebut. Disamping terbentur pada permasalahan agunan atau kolateral yang menjadi prasyarat perbankan; juga prosedur pengajuan kredit tersebut relatif rumit bagi petani sehingga tidak efisien. Selain itu banyaknya pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh oknum akan semakin memberatkan beban petani. Padahal sebagai faktor pelancar, kredit tersebut berperan dalam : a. membantu petani kecil dalam mengatasi keterbatasan modal dengan bunga yang relatif ringan, b. mengurangi ketergantungan petani kepada pedagang perantara dan pelepas uang sehingga berperan dalam memperbaiki struktur dan pola pemasaran, c. mendorong penggunaan input dan teknologi modern sehingga output yang dihasilkan lebih baik, d. insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi usaha tani.

Kabupaten Bantul memiliki luas tanah 50685 hektar yang sebagian besar tanahnya adalah tanah regosol merupakan daerah yang potensial bagi pengembangan tanaman pangan. Di samping itu Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari 5 kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebagian besar petaninya sudah memulai usahatannya dengan pertanian organik.

Akan tetapi sebagian besar dari petani masih memiliki kesulitan dalam masalah permodalan sehingga hasil produksi dan pendapatan yang mereka terima masih kecil. Saat ini rata-rata hasil produksi padi per hektar hanya 60 kuintal yang masih di bawah standar potensi produksi padi di Kabupaten Bantul yaitu 80 kuintal per hektar. Untuk mengintensifikasi dan memperbesar skala usahanya petani

mencoba menambah modal dengan jalan mengajukan kredit kepada koperasi-koperasi yang ada dan kepada bank-bank yang memberikan fasilitas kredit bagi pertanian. Salah satu program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan modal petani dalam usahatani padi melalui fasilitasi PMI (Penguatan Modal Intensifikasi)

Pola pemberdayaan petani melalui fasilitasi PMI dilaksanakan dengan maksud mengatasi berbagai persolan utama ditingkat usahatani, di antaranya adalah keterbatasan modal usahatani, belum berkembangnya usaha-usaha di hulu, hilir dan jasa penunjang dalam sistem agribisnis, rendahnya penguasaan teknologi serta lemahnya sumberdaya manusia dan kelembagaan petani. Secara umum tujuan dari pola pemberdayaan petani melalui fasilitasi PMI adalah : (a) memperkuat modal usaha petani dalam mengembangkan usaha pertanian dan ketahanan pangan; (b) meningkatkan produksi dan produktivitas usaha pertanian di kawasan pengembangan usaha pertanian dan pengolahan hasil pertanian di kawasan pengembangan, (d) meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok tani, (e) mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) dan lembaga ekonomi pedesaan lainnya.

Fasilitasi dana PMI yang semula bernama BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) atau BPLM (Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat) berasal dari dana dekonsentrasi/APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/okota. Dana PMI yang mekanismenya disalurkan langsung melalui rekening kelompok tani untuk penguatan modal usaha, pada hakekatnya merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan untuk memperlus petani penerima manfaat. Oleh karena itu pemanfaatan dana PMUK adalah untuk usaha yang bersifat produktif baik usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura dan peternakan maupun usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Adapun besarnya dana PMUK yang dialokasikan di Kabupaten Bantul pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 sebesar Rp 9.735.006.000 untuk 162 kelompok usahatani. (Dinas Pertanian DIY.2005)

Mengingat bahwa dana PMI hanya bersifat stimulan, maka keberhasilan dalam pelaksanaannya sangat tergantung dari peran pemerintah dalam bentuk pendampingan yang bersifat berkelanjutan terutama dalam membuka peluang usaha bagi masyarakat tani melalui peraturan dan kebijaksanaan daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta dukungan masyarakat dalam pemanfaatan dana PMI dan pergulirannya. Namun dalam kenyataannya belum sepenuhnya dana tersebut berjalan dengan lancar karena dari dana PMI yang digulirkan untuk usahatani padi baru 10 persen yang lancar dalam pengembalian. Kondisi ini menunjukkan program pemberdayaan petani dengan fasilitasi PMI yang dilakukan di Kabupaten Bantul belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal hal ini berkaitan dengan manajemen kelompok tani selaku pengelola dana PMI dan respon petani selaku penerima manfaat kredit

Oleh karena itu perlu dikaji kembali apakah pemerintah dalam memfasilitasi program PMI melalui kelompok tani telah berperan dalam menjamin ketersediaan modal dalam usahatani padi. Diharapkan dengan adanya peran yang memadai, bisa meningkatkan produksi dan pendapatan petani sehingga diperoleh taraf hidup yang lebih baik bagi petani dan kredit berjalan lancar. Berdasarkan masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dikaji yaitu:

1. bagaimana kelompok tani mengelola dana penguatan modal intensifikasi usahatani padi (PMI) untuk pemenuhan kebutuhan modal bagi petani
- 2, seberapa besar tingkat keberhasilan penggunaan dana penguatan modal intensifikasi (PMI) oleh petani
3. faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penggunaan dana penguatan modal intensifikasi (PMI)

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Mendiskripsikan manajemen kelompok tani dalam mengelola dana penguatan modal intensifikasi (PMI) untuk usahatani padi
2. Mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan dana penguatan modal Intensifikasi (PMI)

## **C. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui manfaat kredit PMI sebagai sumber permodalan untuk memenuhi kebutuhan modal dalam usahatani padi yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup petani dan pada jangka panjang dapat menopang ketahanan pangan di Kabupaten Bantul.. Bagi penentu kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai pedoman umum arah kebijakan pengembangan kredit tani .. ..